

---

**ANALISIS PENGARUH KORUPSI TEHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN  
DI INDONESIA**

***ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CORRUPTION ON INCREASING  
DEVELOPMENT IN INDONESIA***

**Tetti Flora Barutu<sup>1</sup>, Devi Trianna<sup>2</sup>**

Administrasi Negara, Universitas Pamulang<sup>1,2</sup>

email : [tettiflora@gmail.com](mailto:tettiflora@gmail.com)<sup>1</sup>, [deviitrianna@gmail.com](mailto:deviitrianna@gmail.com)<sup>2</sup>

Accepted: Dec, 28th 2025 Published: Dec, 30th 2025

---

**ABSTRAK**

Korupsi adalah masalah yang mendasar dan sudah menghambat perkembangan bangsa serta daerah di Indonesia sejak awal pemerintahan hingga masa kini. Korupsi tidak hanya merusak cara kerja pemerintahan, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Penelitian ini penting karena dampak korupsi yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas infrastruktur, serta perubahan sosial yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan menganalisis regulasi, doktrin, serta literatur yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran pembangunan, mengurangi kualitas proyek infrastruktur, serta memperlebar perbedaan antara wilayah yang berkembang dan yang tertinggal. Selain itu, korupsi juga menyebabkan perubahan sosial melalui hilangnya rasa percaya masyarakat, meningkatnya ketidakadilan, serta menjadi anggapan biasa bagi tindakan korupsi dalam masyarakat. Studi kasus proyek Tol MBZ mendukung temuan bahwa korupsi dalam proyek strategis menghambat koneksi antar daerah dan merugikan negara secara ekonomi. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa korupsi merupakan penghambat utama perkembangan daerah dan perubahan sosial yang sehat. Untuk mengatasi korupsi, dibutuhkan peningkatan tata kelola, transparansi, penerapan hukum, digitalisasi prosedur birokrasi, serta partisipasi masyarakat agar praktik korupsi dapat dikurangi dan pembangunan berkelanjutan serta adil dapat tercapai.

Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Regional, Perubahan Sosial, Infrastruktur.

**ABSTRACT**

*Corruption is a fundamental problem that has hampered the development of the nation and regions in Indonesia from the beginning of the government to the present day. Corruption not only undermines the way government functions but also creates significant economic and social inequality. This research is important because of its far-reaching impact on regional economic growth, infrastructure quality, and social change, which erode public trust in the state. This research uses a legal approach by analyzing relevant regulations, doctrines, and literature. The results show that corruption causes imbalances in the use of development budgets, reduces the quality of infrastructure projects, and widens the gap between developing and underdeveloped regions. Furthermore, corruption also causes social change through the loss of public trust, increased injustice, and the common perception of corruption in society. The case study of the MBZ Toll Road project supports the finding that corruption in strategic projects hinders inter-regional connections and harms the country economically. The study concludes that corruption is a major*

*obstacle to regional development and healthy social change. Addressing corruption requires improved governance, transparency, law enforcement, digitization of bureaucratic procedures, and public participation to reduce corrupt practices and achieve sustainable and equitable development.*

*Keyword : Corruption, Regional Development, Social Change, Infrastructure.*

---

\*Corresponding author: tettiflora@gmail.com

E-ISSN 3123-7312

## **A. Pendahuluan**

Korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Praktik korupsi tidak hanya merusak tatanan pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga menggerogoti fondasi ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan regional, korupsi menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah maju dan tertinggal (Amalia, 2022). Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ke tangan segelintir elit, sehingga memperburuk disparitas dan menimbulkan masalah sosial yang luas.

Sejarah korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Saat itu, pemerintahan berlaku dengan sistem patrimonial dan feodal. Sistem ini membuat para bangsawan, pejabat kerajaan, dan para abdi dalem melakukan tindakan korup, seperti memanfaatkan uang hasil upeti dan kekuasaan. Perilaku seperti ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Saat penjajahan Belanda berlangsung, praktik korupsi tetap terus berlangsung. Belanda justru meniru sistem korup yang sudah ada sebelumnya. Mereka juga memanfaatkan kelemahan moral para penguasa lokal dengan cara politik *divide et impera*. Setelah Indonesia merdeka, korupsi tidak pernah benar-benar hilang. Pada masa Orde Lama, pemerintah pernah membentuk Operasi Budhi, tapi upaya itu tidak efektif. Di masa Orde Baru, pemerintah membentuk beberapa lembaga seperti Komite Empat, TPK, dan Opstib untuk menangani korupsi. Namun semua upaya tersebut tidak berhasil menghentikan korupsi, bahkan membuatnya semakin mengakar di dalam birokrasi. Selama masa Reformasi, korupsi menyebar ke seluruh elemen penyelenggara negara eksekutif, Legislatif, dan yudikatif hingga mendorong dibentuknya KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi secara lebih kuat (Joniarta wayan i, 2018).

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK**

No	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkract	Eksekusi
1	2004	23	2	2	0	0
2	2005	29	19	17	5	4
3	2006	36	27	23	14	13
4	2007	70	24	19	19	23
5	2008	70	47	35	23	24
6	2009	67	37	32	37	37
7	2010	54	40	32	34	36
8	2011	78	39	40	34	34
9	2012	77	48	36	28	32
10	2013	81	70	41	40	44
11	2014	80	58	50	45	48
12	2015	87	57	62	38	38
13	2016	96	99	76	71	81
14	2017	123	121	103	84	83
15	2018	164	199	151	109-	113
16	2019	142	145	153	142	136
17	2020	111	91	75	92	108
18	2021	119	108	88	87	89
19	2022	113	120	133	141	101
20	2023	127	161	129	113	124
21	2024	73	154	91	91	108

Sumber: laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari tahun 2004 - 2024.

Kasus ini ditangani oleh KPK dengan 5 (lima) tahapan proses hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, peneuntutan, putusan inkracht dan eksekusi. Dapat dijelaskan bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah lama terjadi dan sudah jadi membudaya sampai sekarang. Berikut beberapa kasus korupsi di Indonesia yang merugikan negara dan warga Indonesia antara lain, seperti: a). BBM Oplosan di PT Pertamina Parta Niaga mencapai kerugian sebesar Rp 193,7 triliun. Pada tahun 2018 sampai 2023. Telah ditetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini, meliputi enam pejabat dari PT Pertamina Patra Niaga dan tiga pihak swasta (Hartanto et al., 2025); b). Korupsi Tata Niaga timah di bangka bitung mencapai kerugian mulai tahun 2015-2022 sebesar Rp271 triliun.dalam kasus ini terdapat 21 tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan, meliputi pengusaha dan mantan PT pejabat kasus korupsi tata niaga timah (Antrag et al., 2024); c). Korupsi perampasan tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Riau bermula pada tahun 1999-2008 ketika Raja Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu, memberikan izin usaha tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Penggarapan lahan seluas 37.095 hektar secara tidak sah oleh PT Duta Palma telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 78 triliun yang terdiri dari kerugian finansial dan kerusakan lingkungan (Aulia

et al., 2025); dan d). PT. ASABRI melakukan tindakan fraud berupa korupsi melalui kesepakatan transaksi saham investasi dan reksa dana yang ilegal, manipulasi data laporan keuangan yang menguntungkan pihak luar perusahaan. Tindakan ini melibatkan 9 tersangka atas dakwaan yang dilakukan dan diperkirakan telah menyebabkan kerugian bagi negara Indonesia sebesar Rp 22,78 triliun(Christian et al., 2023).

Ada banyak lagi kasus korupsi di Indonesia yang dapat merusak kepercayaan Masyarakat dan kualitas pembangunan di Indonesia menurun. Pertumbuhan ekonomi yang dilandasi oleh pemerataan pembangunan merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Namun, korupsi menghambat proses tersebut dengan menimbulkan distorsi dalam alokasi anggaran pembangunan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi kemajuan daerah. Penelitian oleh Ariani (Ariani, 2023) menegaskan bahwa korupsi di sektor konstruksi dan infrastruktur terbukti menurunkan kualitas pelayanan publik dan menahan ekspansi produk domestik bruto (PDB) regional. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas ekonomi, menurunnya investasi, dan kualitas produk yang buruk, sehingga menimbulkan stagnasi pertumbuhan di banyak wilayah.

Korupsi yang meluas juga berdampak pada aspek sosial melalui melemahnya kepercayaan warga terhadap pemerintahan dan lembaga hukum. Masyarakat yang melihat kelemahan penegakan hukum dan praktek korupsi sistemik menjadi cenderung apatis dan kehilangan harapan akan perubahan. Konsekuensi sosial ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang memperparah masalah kemiskinan dan marginalisasi kelompok rentan. Korupsi melemahkan norma sosial dan integritas yang seharusnya mendukung keadilan serta solidaritas dalam masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial dan merusak harmoni komunitas.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimulai secara yuridis pada era Orde Lama dengan beberapa regulasi awal, kemudian berkembang melalui reformasi kebijakan pada masa reformasi dan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meski demikian, tantangan nyata tetap muncul dari akar sistemik yang mengakar dalam birokrasi dan politik. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan multidimensional, mulai dari penguatan hukum dan institusi anti-korupsi, peningkatan transparansi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Secara historis, korupsi di Indonesia juga terkait dengan akumulasi utang negara yang membengkak akibat penyalahgunaan dana publik, terutama pada sektor industri dan keuangan. Hal ini memperburuk situasi fiskal dan membatasi kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan sosial dan infrastruktur. Dampak ekonomi ini secara langsung menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit akses mereka terhadap layanan publik yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum (Syuraida & Pendidikan Sejarah, 2015).

Dalam konteks pembangunan regional, korupsi memperlambat proses desentralisasi yang seharusnya memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola

potensi ekonominya. Ketika dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerah disalahgunakan, maka efektivitas pelaksanaan program pembangunan menurun drastis, menciptakan ketimpangan yang melebar dan memperburuk kesenjangan sosial antar wilayah. Misalnya, dana konstruksi infrastruktur yang digelapkan menyebabkan banyak jalan dan fasilitas umum dibangun dengan standar rendah, sehingga tidak bertahan lama dan membatasi konektivitas antar wilayah, padahal hal tersebut krusial bagi perkembangan ekonomi lokal.

Korupsi Akibat utama dari korupsi dalam pembangunan regional bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial kultural. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan korup cenderung menginternalisasi norma koruptif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, melemahkan nilai-nilai etika dan kejujuran. Hal ini secara langsung mengikis kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, sehingga sulit membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan publik.

Penelitian ini penting mengingat dampak multidimensi korupsi terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan aspek sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana korupsi memengaruhi dinamika pembangunan regional dan perubahan sosial di Indonesia secara sistemik, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi dalam konteks pembangunan nasional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan sepenuhnya berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, serta dokumen penelitian terdahulu yang relevan dengan isu korupsi dan pembangunan di Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Regional**

Korupsi telah menjadi penghambat utama dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah perlambatan pembangunan daerah yang disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran pembangunan dan lemahnya pengawasan birokrasi. Studi oleh mengungkapkan bahwa korupsi menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya publik, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik justru mengalir ke kantong pribadi. Misalnya, proyek infrastruktur yang mendapat dana APBD sering mengalami

mark-up biaya dan pengerjaan berkualitas rendah, sehingga infrastruktur tidak bertahan lama dan tidak mendukung pertumbuhan daerah secara optimal.

Ketimpangan antarwilayah menjadi semakin nyata akibat korupsi. Wilayah-wilayah yang memiliki sistem pengawasan lemah dan tingkat korupsi yang tinggi cenderung tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih transparan. Contohnya, ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa yang relatif maju dengan wilayah luar Jawa seperti di Papua atau Nusa Tenggara. Dana pembangunan yang diselewengkan di daerah-daerah tertinggal memperparah jarak kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah tersebut dan pusat-pusat ekonomi utama (Putri, 2023).

Dampak lain dari korupsi adalah penurunan kualitas proyek pembangunan. Pengadaan barang dan jasa yang korup menghasilkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak sesuai spesifikasi teknis, yang akhirnya berdampak pada menurunnya daya guna fasilitas tersebut. Kondisi ini melemahkan kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan daerah menghambat efektivitas belanja publik dan merusak infrastruktur (Keuangan, 2023).

Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi regional dengan mengurangi minat investor, terutama investor asing yang cenderung menghindari wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, daerah yang korup mengalami stagnasi ekonomi dan sulit mengembangkan sektor riil yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya institusi pemerintahan dan buruknya tata kelola yang berkontribusi pada rendahnya daya saing daerah secara keseluruhan (Akbar, 2025).

### **Dampak Korupsi Terhadap Perubahan Sosial**

Korupsi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap struktur sosial dan perilaku masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Ketika masyarakat mengalami korupsi secara langsung dalam pelayanan publik, seperti proses perizinan, pendidikan, atau kesehatan, maka kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis. Survei menunjukkan bahwa korupsi mendorong sikap apatis dan ketidakpedulian warga dalam proses politik dan pengawasan pemerintahan (Amalia F. , 2022).

Ketidakadilan sosial meningkat akibat korupsi yang memperbesar gap antara kelompok elit yang memperoleh keuntungan dan masyarakat miskin yang tertinggal. Dengan dana pembangunan yang bocor dan tidak tepat sasaran, layanan sosial bagi kelompok rentan menjadi terabaikan, sehingga memperburuk kemiskinan dan

ketimpangan. Hal ini juga menimbulkan sikap negatif seperti kecemburuan sosial dan potensi konflik horizontal di masyarakat (Lamijan, 2022).

Perubahan perilaku masyarakat akibat korupsi juga tampak pada meningkatnya sikap permisif dan normalisasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak warga yang menganggap korupsi sebagai suatu hal yang lumrah atau bahkan perlu untuk mempercepat birokrasi. Kondisi ini mengikis nilai moral dan budaya anti-korupsi, serta menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus. Apatisme politik juga menjadi dampak sosial yang nyata, di mana masyarakat cenderung menarik diri dari partisipasi politik karena merasa tidak memiliki pengaruh dan perubahan yang berarti.

Kualitas hidup masyarakat menurun karena korupsi menyebabkan anggaran pelayanan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi, sehingga fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi sangat terbatas. Kondisi ini memperburuk standar hidup dan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah yang sudah mengalami keterbatasan pembangunan (Putri, 2023).

### **Studi Kasus Pembangunan di Indonesia**

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah pusat dan daerah, korupsi banyak ditemukan pada proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Kasus-kasus korupsi proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya praktik mark-up biaya, kolusi antara kontraktor dan pejabat daerah, serta penggunaan material berkualitas rendah. Proyek-proyek ini sering kali gagal memberikan manfaat maksimal karena kualitas pekerjaannya buruk dan rentan rusak cepat, menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal (Kamil, 2019).

Birokrasi daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan cenderung mengalami lemahnya kontrol internal. Banyak pejabat daerah yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi tanpa akuntabilitas penuh. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan partisipasi publik yang minim, sehingga praktik korupsi sulit diberantas dan berdampak langsung pada proyek dan kebijakan pembangunan (Amalia, 2022).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menerima porsi anggaran pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa, yang menyebabkan disparitas sosio-ekonomi semakin melebar. Korupsi yang terjadi di wilayah luar Jawa cenderung membuat kondisi ini semakin memburuk karena dana yang terbatas tidak dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial (Lamijan, 2022).

## Contoh Kasus

Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau yang dikenal sebagai Tol MBZ merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis bernilai kontrak sekitar Rp 16,23 triliun, yang menghubungkan daerah Cikunir hingga Karawang Barat. Proyek ini diinisiasi antara tahun 2016 hingga 2020 oleh PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) dengan tujuan mengurangi kemacetan sekaligus mempercepat distribusi logistik dan mobilitas menuju kawasan industri di Jawa Barat (Zultaqawa et al., 2024).

Namun, proyek strategis ini menjadi sorotan lantaran terindikasi kuat praktik korupsi yang merugikan negara sebesar Rp510 miliar, yang terdakwa dalam kasus ini Djoko Dwijono (mantan pejabat pelaksana proyek), Yudhi Mahyudin (ketua panitia lelang), Sofiah Balfas dan Tony Budianto Sihite (pihak konsultan dan rekanan), dituduh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tipikor Jakarta (30 Juli 2024), ditemukan 7 bentuk penyimpangan dalam proyek tersebut:

1. Manipulasi Tender – Panitia lelang memberikan keuntungan kepada konsorsium KSO Waskita-Acset tanpa melakukan evaluasi dokumen penawaran.
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lapangan, hanya berdasarkan referensi dari pihak pelaksana proyek.
3. Perubahan Dokumen Teknis yang mengarahkan spesifikasi pada perusahaan tertentu, yakni PT Bukaka Teknik Utama.
4. Perubahan Desain Girder dari bentuk “P” menjadi “U” tanpa dasar perencanaan, yang berdampak pada penurunan kualitas struktur.
5. Penurunan Mutu Beton dari standar K500 menjadi FC 35 MPa yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
6. Tidak Ada Evaluasi dan Pengawasan terhadap hasil pekerjaan proyek.
7. Subkontrakan Seluruh Pekerjaan Utama kepada pihak lain tanpa izin sesuai kontrak.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang menemukan indikasi pengurangan volume pekerjaan secara ilegal dan pengaturan tender yang menguntungkan pihak tertentu. Modus korupsi melibatkan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk manipulasi spesifikasi teknik pembangunan jalan tol. Misalnya, volume beton dan baja yang harusnya digunakan dikurangi tanpa disetujui pihak berwenang sehingga menghemat biaya namun mengorbankan mutu konstruksi (Setiawan, 2023).

Kejaksanaan Agung terus mendalami kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi termasuk pejabat dan kontraktor yang terkait. Penyelidikan juga mengarah pada

dugaan Menurut pengungkapan Kejaksaan Agung, para tersangka melakukan tindakan melawan hukum berupa, Pengurangan spesifikasi teknis konstruksi tanpa izin, misalnya mengganti material berkualitas tinggi dengan kualitas rendah, yang secara signifikan mengurangi biaya pembangunan, Pengaturan proses tender sehingga perusahaan tertentu yang sudah dimakan fee dapat memenangkan kontrak tanpa perlakuan adil, Penggelembungan dokumen dan laporan pelaksanaan pekerjaan untuk menutupi pengurangan volume dan mutu.

Modus-modus ini menguntungkan oknum tertentu namun menyebabkan kerugian negara yang besar serta melemahkan kualitas jalan tol (Ristiyanti, 2025). Lalu pada akhirnya kasus korupsi dalam proyek Tol MBZ berdampak luas, terutama pada Pertumbuhan Ekonomi Regional yaitu proyek yang terhambat kualitasnya memperlambat konektivitas dan efisiensi logistik di kawasan industri utama, mengurangi daya saing daerah Jawa Barat. Lalu berdampak pada kualitas Infrastruktur yang dimana Jalan tol mengalami risiko kerusakan lebih cepat dan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi sehingga menghambat fungsi ekonomi dan juga kepercayaan Publik yang menjadi penurunan kepercayaan pada proyek pemerintah dan lembaga terkait, yang berpotensi menimbulkan sikap apatis dan ketidakpercayaan pada birokrasi.

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan KPK terus mengusut tuntas kasus ini sebagai bagian dari komitmen memberantas korupsi di sektor infrastruktur. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penetapan tersangka sebagai langkah penting pemberantasan korupsi di BUMN dan badan usaha milik negara yang menangani proyek infrastruktur (CNBC Indonesia, 2023). Pengadilan telah menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara dan denda kepada sejumlah pelaku korupsi terkait proyek ini. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pengelolaan proyek pembangunan infrastruktur, mendorong reformasi pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di masa depan.

#### **D. Penutup**

Korupsi terbukti menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan di daerah dan memperburuk perubahan sosial di Indonesia. Praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis dalam birokrasi, pengadaan barang dan jasa, serta proyek infrastruktur menyebabkan distorsi dalam pengalokasian anggaran, menurunkan kualitas infrastruktur, serta melemahkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak dari korupsi ini memperlebar ketimpangan antara wilayah yang berkembang dengan wilayah yang tertinggal dan menurunkan daya saing daerah. Secara sosial, korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memunculkan sikap apatis terhadap politik, serta menormalisasi perilaku korup di kehidupan sehari-hari, sehingga memperburuk tata kelola sosial dan moral masyarakat.

Studi kasus proyek Tol MBZ menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek strategis menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak integritas pembangunan infrastruktur. Penyimpangan seperti manipulasi tender, penurunan spesifikasi teknis, dan pengurangan volume pekerjaan membuktikan bahwa korupsi berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan dan pemerataan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang menyeluruh dan konsisten.

## E. Referensi

- Akbar, M. R. (2025). *KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH:KAJIAN LITERATUR*. *Socius: Jurnal Sosiologi dan Humaniora*, 10(2), 98-117.
- Amalia, S. (2022). ANALISIS DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN SHELTER TSUNAMI DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), hal. 54–76.
- Anjarwati Dwi. (2012). CLUSTERING PENINDAKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA MENGGUNAKAN K-MEANS: ANALISIS DATA KPK TAHUN 2004-2024. *Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Antrag, I. La, Situmaeng, Y. T., Arinda, S., & Rochim, A. A. (2024). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Penegakan Hukum Pertambangan Timah Illegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung* (Vol. 3, Issue 02). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Aulia, I., Dwi Aryanti, R., & Marlina, L. (2025). *HARE: Sharia Economic Review KASUS KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PT DUTA PALMA GROUP DALAM ETIKA BISNIS ISLAM*. 02.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). ANALISIS KASUS PT. ASABRI (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD. In *Jurnal Multilingual* (Vol. 3, Issue 3). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Issue 01).
- Joniarta wayan i. (2018). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya). *Ilmiah Dinamika Sosial*, 2.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syarkawi, S., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2023). Village Financial Management In Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(187), 10-24114.

- Syuraida, H., & Pendidikan Sejarah, J. (2015). PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 3, Issue 2).
- Zultaqawa, Z., Donie Aulia, M., Sidik Ginanjar, Y., Ali, C., Zakaria, F., & Ravena, D. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK JALAN TOL MBZ*. 7(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.14599>